



## **ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH POST PANDEMIC TENTANG PELAKU PERJALANAN LUAR NEGERI (PPLN)**

**Regita Cahyaning Banowati, Dian Suluh Kusuma Dewi**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

### **Abstrak**

Setelah melewati masa kritis pandemi covid-19 selama 2 tahun dengan menerapkan kebijakan dari pemerintah. Tahun ini perkembangan pandemi covid-19 di Indonesia terus membaik. Dilihat dari jumlah kasus yang terus mengalami penurunan dan vaksinasi yang terus meningkat. Perubahan status pandemi menjadi endemi perlahan dilakukan Indonesia. Pemerintah melakukan pelonggaran mobilitas masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan publik mengenai pelaku perjalanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan yang ditetapkan pemerintah sudah tepat dan efektif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur dengan mengumpulkan data dari media secara online dan website resmi pemerintah, buku atau manuskrip yang berhubungan dengan penelitian terkait. Guna mempermudah analisis data penelitian dalam jumlah besar, maka selama pemrosesan data menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus guna mempermudah dalam pengkodean data serta memastikan kebenaran data kualitatif ini. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan publik yang diimplementasikan oleh pemerintah dapat dikatakan tepat dan juga efektif. Kebijakan tersebut sangat berpengaruh dan berdampak cukup signifikan bagi berbagai sektor penting di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kebijakan Publik, Pasca Covid-19, PPLN.

## **PENDAHULUAN**

Pertama kali kasus Covid-19 terdeteksi pada manusia dengan gejala peradangan paru-paru (*pneumonia*) di Wuhan, Cina 30 Desember 2019 (Ismail, 2020). Kasus pertama covid-19 di Indonesia diumumkan dua tahun lalu, pandemi covid-19 belum berakhir. Setelah melalui berbagai macam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi memutus mata rantai penularan covid-19. Jumlah kasus terkonfirmasi covid-19 terus menurun. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia yang secara signifikan dapat menurunkan angka infeksi covid-19. Melalui kebijakan, seperti kampanye 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi), penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), dan program vaksinasi nasional (Joyosemito, 2021). Data dari Satgas covid-19, menyatakan sampai dengan awal tahun ini di Indonesia (19 Mei 2022) terdapat 6.051.850 kasus positif, 5.891.574 sembuh, dan 156.500 meninggal dunia akibat covid-19. Indonesia mengalami lonjakan kasus covid-19 pada tahun 2020. Namun, saat ini tercatat hingga 19 Mei 2022 perkembangan pandemi covid-19 di Indonesia terus membaik (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2022).

Perubahan status pandemi menjadi endemi perlahan dilakukan Indonesia. Pemerintah akan transisi dari pandemi ke endemi karena covid-19 tidak akan hilang dalam waktu dekat. Menurut dr. Novrina W. Resti (Dokter Poliklinik Itjen Kemendikbud) endemi adalah penyakit yang menular di suatu daerah atau sekelompok orang. Endemi merupakan suatu keadaan atau kemunculan penyakit yang terjadi terus menerus atau umum terjadi pada suatu populasi dan wilayah geografis tertentu (Kemendikbud, 2022).

Dalam unggahan akun website resmi Presiden RI dengan tajuk "Presiden Jokowi: Siapkan Transisi dari Pandemi ke Endemi" dalam unggahan tersebut Presiden Joko Widodo mengatakan akan memulai transisi dari pandemi ke endemi. Presiden menegaskan bahwa pandemi covid-19 tidak akan hilang dalam waktu dekat, sehingga setiap orang harus siap untuk hidup dengan virus covid-19 (Setpres, 2021).

Pemerintah secara bertahap memberi kelonggaran aktivitas untuk masyarakat selama masa transisi. Pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan sejumlah langkah pelonggaran, termasuk kebijakan terhadap pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Kebijakan yang sesuai dengan arahan Presiden tentang pelaku perjalanan luar negeri (PPLN), Satgas mengeluarkan Surat Edaran No. 15 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri dalam Masa Pandemi Covid-19.

Dalam siaran pers terkait kebijakan PPLN dan panduan protokol kesehatan Ramadan dan idul fitri 2022, Presiden Joko Widodo mengeluarkan aturan bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri. Aturan ini sesuai dengan Surat Edaran No. 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19. Presiden mengatakan seluruh pelaku perjalanan luar negeri yang datang di Indonesia akan dibebaskan dari karantina. Namun, tetap melakukan tes usap PCR sesuai aturan pemerintah. Apabila hasil tes negatif maka akan dibebaskan dari karantina, sedangkan jika hasil tes positif maka akan ditangani oleh satgas covid-19 (Sumber: channel youtube sekretariat presiden).

Secara umum, definisi kebijakan dinilai sebagai upaya guna mencapai tujuan tertentu dan upaya guna menyelesaikan masalah dengan

menggunakan fasilitas dalam jangka waktu tertentu (Pangaribuan, 2021).

Kebijakan publik sebagaimana dijelaskan oleh Wahab; kebijakan publik adalah tindakan sadar menuju pencapaian tujuan. Kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah. Kebijakan publik terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dan mempunyai pola yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Kebijakan publik dikatakan positif dalam arti memandu tindakan pemerintah yang akan diambil untuk memecahkan suatu masalah, atau dikatakan negatif dalam arti pejabat pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu (Ramdhani, 2020).

Untuk melihat efektifitas kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka poin penilaian suatu kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh Thomas R. Dye adalah dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok sasaran, dampak terhadap situasi atau kelompok lain, terhadap target, dampak pada masa depan dan kondisi darurat, biaya, khususnya sumber daya program dan biaya tidak langsung (Dye, 2017).

PPKM (Pembatasan Sosial Berskala Besar) merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo dalam menanggapi covid-19 di Indonesia. Dalam konferensi persnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan kepada publik kebijakan yang dipilihnya untuk merespon covid-19 sebagai pandemi global yang dihadapi masyarakat Indonesia. Presiden mengeluarkan pernyataan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan sebagai landasan hukum dari kebijakan antisipatif dalam merespon adanya kedaruratan kesehatan (Pemerintah Indonesia, 2018). Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan penduduk di wilayah yang diduga terjangkit virus covid-19 dengan tujuan untuk mencegah

penyebaran penyakit akibat virus covid-19 (Ristyawati, 2020).

Hasil temuan lain, menurut (Colfer, 2020) pada awal datangnya pandemi covid-19, pemerintah Irlandia dan Inggris juga mengeluarkan kebijakan untuk menghadapi covid-19 dengan pemberlakuan pembatasan pada pergerakan, asosiasi, dan aktivitas ekonomi seperti yang dilakukan oleh beberapa kota di Eropa. Pembatasan kegiatan yang termasuk antara lain; penutupan sekolah dan bisnis, larang pertemuan besar.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan terhadap maskapai penerbangan Indonesia yang menerima warga negara asing di masa pandemi covid-19 diterapkan melalui Surat Edaran untuk pelaku perjalanan luar negeri. Sesuai Surat Edaran No. 1 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

Penanganan covid-19 semakin membaik dan terkendali pemerintah kembali melakukan pelanggaran kebijakan mengenai pemakaian masker dan syarat perjalanan. Pada Selasa, 17 Mei 2022 dalam konferensi persnya Presiden Joko Widodo menyatakan pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri dibebaskan dari tes swab *PCR* maupun antigen apabila telah mendapatkan dosis vaksis lengkap. Aturan ini sesuai dengan Surat Edaran No. 19 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), yang berlaku mulai 18 Mei 2022.

Kebijakan tidak dapat dilakukan sendiri, harus adanya kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat. Pemerintah harus memprioritaskan kepentingan bersama untuk kesejahteraan masyarakatnya. Mengurangi ego, sikap mementingkan

diri sendiri. Kepentingan rakyat terlihat dari ego yang tinggi terkesan bahwa kebijakan yang dipicu melalui kebijakan peraturan pemerintah memiliki konflik kepentingan (Nurwita, 2020).

Dalam artikel ini akan membahas mengenai kebijakan pemerintah *post pandemic* tentang pelaku perjalanan luar negeri (PPLN), dimana penulis bertujuan untuk menganalisis seberapa efektifnya kebijakan yang dilakukan pemerintah.

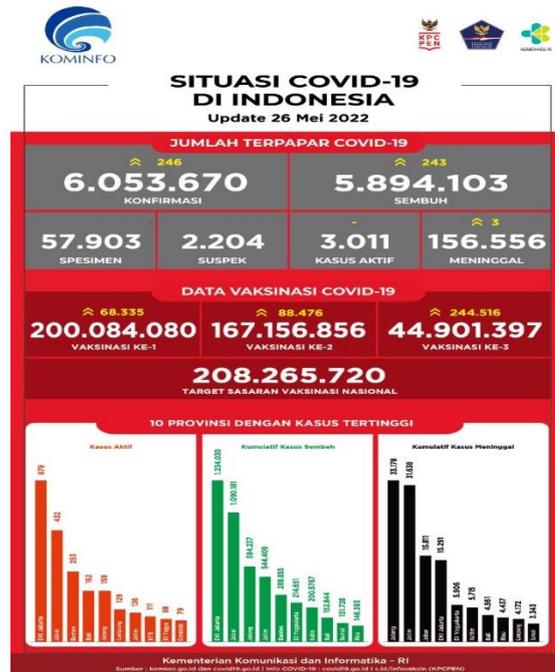
### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan beberapa terori seperti kebijakan publik, analisis wacana serta analisis kerangka. Menurut Kurt dan Miler penelitian kualitatif adalah tradisi khas dalam ilmu-ilmu sosial yang pada dasarnya bergantung pada pengamatan manusia dibidangnya sendiri dan dalam kaitannya dengan bahasa dan terminologinya (Moleong, 2004). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literature dengan mengumpulkan data dari media online dan website resmi pemerintah, buku atau manuskrip yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah *post pandemic* tentang pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dan jurnal penelitian sebelumnya. Fokus penelitian adalah kebijakan pemerintah *post pandemic* tentang pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Guna mempermudah analisis data penelitian dalam jumlah besar, maka selama pemrosesan data menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus guna mempermudah dalam pengkodean data serta memastikan kebenaran data kualitatif ini.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemulihan pandemi covid-19 di Indonesia terus dilakukan. Hingga Februari 2022, jumlah kasus dan kematian covid-19 terus menurun. Dilihat dari jumlah konfirmasi positif

covid-19 di kota-kota besar dan pada penduduk, setiap hari semakin berkurang. Tingkat keterisian rumah sakit juga sudah mulai terkendali.



Gambar 1, Data Covid-19 dan Vaksinasi di Indonesia (Pertanggal 26 Mei 2022)

Sumber : Update Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id)

Dari data diatas dapat dilihat kasus covid-19 di Indonesia berdasarkan update penanganan covid-19 per tanggal 26 Mei 2022 terus mengalami penurunan. Dan tercatat tingkat vaksinasi yang dilakukan pemerintah terus meningkat mulai dari vaksinasi ke 1, vaksinasi ke 2, sampai vaksinasi ke 3.

Kasus covid-19 semakin menurun, mobilitas masyarakat semakin meningkat. Transisi Indonesia dari pandemi menuju endemi covid-19. Seiring dengan terus membaiknya kondisi pandemi covid-19 di Indonesia, perlahan pemerintah melakukan pelonggaran mobilitas masyarakat selama masa transisi menuju endemi covid-19. Dengan adanya pelonggaran mobilitas tersebut dapat mempermudah masyarakat melakukan aktivitas yang sebelumnya terkendala karena pandemi covid-19. Namun masyarakat harus tetap

mematuhi protokol kesehatan dalam setiap aktivitas yang dilakukan agar tidak terjadi lonjakan kasus covid-19.

Dengan adanya pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mobilitas masyarakat terus meningkat. Peningkatan tren mobilitas terlihat dari tempat wisata, dermaga, stasiun, bandara. Pelonggaran tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia saja melainkan dirasakan juga oleh warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia.

### Kebijakan pemerintah Indonesia



Gambar 2, Olah data Nvivo 12 plus, (2022)

Dilihat dari olah data pada gambar 2 diatas, menjelaskan tentang kebijakan publik yang dilakukan pemerintah selama masa transisi pandemi menuju endemi. Pada masa transisi ini pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan secara menyeluruh dan bertahap. Diawali dengan perizinan peningkatan aktivitas masyarakat. Dengan tujuan untuk pemulihan ekonomi nasional yang terkena dampak akibat pandemi covid-19 dua tahun lalu. Salah satu kebijakan yang dilakukan yaitu pelonggaran aturan untuk pelaku perjalanan, baik nasional maupun internasional. Meniadakan syarat karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri dengan tetap melakukan tes usap PCR sesuai aturan pemerintah. Dengan hasil tes negatif akan dibebaskan karantina dan jika hasil tes positif akan tetap ditangani oleh Satgas covid-19.

Pemerintah terus melakukan evaluasi sejalan dengan keadaan yang terus membaik dengan meningkatkan kebijakan bagi pelaku perjalanan, dibebaskan pemeriksaan PCR atau antigen dengan syarat sudah vaksin lengkap yaitu vaksin 1, vaksin 2, dan vaksin 3. Kebijakan ini merupakan langkah awal untuk transisi dari pandemi menjadi endemi.

Sejak dikeluarkannya kebijakan baru tersebut Indonesia tetap optimis dapat keluar dari pandemi covid-19 ini. Kebijakan ini juga dinilai mampu menghidupkan kembali perekonomian nasional dan menjadi tren penyebaran COVID-19 di Indonesia yang mulai melambat. Penerapan kebijakan ini dapat dikatakan efektif dan tepat untuk perubahan Indonesia. Sangat berpengaruh, hingga memberi dampak positif bagi berbagai sektor yang ada.

Terlepas dari kebijakan yang ditetapkan pemerintah mengenai perizinan peningkatan aktivitas masyarakat, upaya vaksinasi terus dilanjutkan sesuai target yang dicapai. Dalam masyarakat budaya hidup sehat dan bersih seperti protokol kesehatan juga harus tetap berjalan karena hakikatnya pandemi belum resmi dinyatakan berakhir oleh WHO.

Sejak akhir tahun 2019 virus covid-19 melanda Indonesia pemerintah terus melakukan berbagai kebijakan untuk menangani pandemi covid-19. Selalu melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ditetapkan untuk menekan persebaran covid-19 di Indonesia. Namun, setelah melewati masa kritis pandemi covid-19 selama 2 tahun dengan menerapkan kebijakan dari pemerintah. Tahun ini perkembangan pandemi covid-19 di Indonesia terus membaik. Dilihat dari jumlah kasus yang terus mengalami penurunan dan vaksinasi yang terus meningkat. Karena peningkatan ini Indonesia siap merubah kondisi pandemi menjadi endemi. Seiring

dengan perubahan yang terjadi pemerintah terus meningkatkan penanganan covid-19 dengan tetap mengeluarkan kebijakan publik sesuai keadaan yang terjadi.

Hal diatas sejalan dengan pernyataan Wahab (Ramdhani, 2020) Kebijakan publik sebagaimana dijelaskan oleh Wahab; kebijakan publik adalah tindakan sadar menuju pencapaian tujuan. Kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah. Kebijakan publik terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dan mempunyai pola yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Kebijakan publik dikatakan positif dalam arti memandu tindakan pemerintah yang akan diambil untuk memecahkan suatu masalah, atau dikatakan negatif dalam arti pejabat pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu.

Secara umum, definisi kebijakan dinilai sebagai upaya guna mencapai tujuan tertentu dan upaya guna menyelesaikan masalah dengan menggunakan fasilitas dalam jangka waktu tertentu (Pangaribuan, 2021).

## **SIMPULAN**

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, pemerintah dengan pemangku kepentingan di sektor tertentu dengan tujuan tertentu yang sadar dan terarah. Kebijakan publik yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk menuju perubahan Indonesia, masa transisi pandemi menjadi endemi. Dilihat dari penelitian diatas, kebijakan publik yang diimplementasikan oleh pemerintah dapat dikatakan tepat dan juga efektif. Dilihat dari jumlah kasus covid-19 di Indonesia yang terus mengalami penurunan walaupun sudah diberlakukannya berbagai kebijakan pelonggaran mobilitas masyarakat khususnya kebijakan mengenai pelaku perjalanan. Kebijakan tersebut sangat

berpengaruh dan berdampak cukup signifikan bagi berbagai sektor penting di Indonesia. Tugas pemerintah dan masyarakat untuk saling bekerja sama untuk menerapkan dan mensukseskan kebijakan yang telah ditetapkan agar mencapai target yang diinginkan.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Atas terselesainya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah memberi dukungan sepenuh hati juga kepada ibu Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP yang telah membimbing penulisan artikel ini dengan sepenuh hati, serta kepada bapak Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A selaku kaprodi Ilmu Pemerintahan, sehingga artikel ini bisa terlaksana dan terselesaikan dengan baik, dan juga kepada teman-teman seperbimbingan yang telah saling membantu dalam menyelesaikan artikel ini dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Colfer, B. (2020). Herd-immunity across intangible borders: Public policy responses to COVID-19 in Ireland and the UK. *European Policy Analysis*, 6(2), 203-225. <https://doi.org/10.1002/epa2.1096>
- Covid-19, S. T. P. (2022). *Data Sebaran Covid-19 (update per 19 Mei 2022)*. <https://Covid19.Go.Id/>.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (Fifteenth). PEARSON.
- Indonesia, P. (2018). *Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kerantinaan Kesehatan*.
- Ismail, N. (2020). The dynamics of government policy in handling Corona Virus Disease 2019. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 4(2), 158-165. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v4i2.585>
- Joyosemito, I. S., Nasir, N. M., Teknik, F., Bhayangkara, U., Raya, J., Mulya, M., Utara, B., Bekasi, K., Kesehatan, F. I., & Selatan, T. (2021). *GELOMBANG KEDUA PANDEMI MENUJU ENDEMI COVID-19 : ANALISIS KEBIJAKAN VAKSINASI DAN PEMBATAAN KEGIATAN*. 2(1), 55-66.

Moleong, L. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.

Pangaribuan, M. T., Kajian, M., Nasional, K., Indonesia, U., Munandar, A. I., Kajian, M., Nasional, K., & Indonesia, U. (2021). *KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA MENANGANI PANDEMI COVID-19* Meilinda Triana Pangaribuan Magister Kajian Ketahanan Nasional , Fakultas Kajian Stratejik dan Global , Adis Imam Munandar Magister Kajian Ketahanan Nasional , Fakultas Kajian Stratejik dan Globa. 14, 1–9.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2020). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>

Resti, dr. N. W. (Dokter P. I. K. (2022). *Memahami Istilah Endemi, Epidemi, dan Pandemi*. <https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/covid-19/memahami-istilah-endemi-epidemi-dan-pandemi/>.

Ristyawati, A. (2020). *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*. 3(2), 240–249.

Setpres, B. (2021). *Presiden Jokowi: Siapkan Transisi dari Pandemi ke Endemi*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-siapkan-transisi-dari-pandemi-ke-endemi/>.